

Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1973

M. Zulhan Arifin, Jumadi, Najamuddin
Pendidikan Sejarah FIS UNM
mzulhamarifin2602@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor lahirnya politik luar negeri bebas aktif Indonesia, kondisi politik luar negeri pada masa akhir Orde Lama dan Awal Orde Baru, dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia masa awal Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari, heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (kritik intern dan ektern), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian pustaka terdiri dari mengumpulkan sumber buku, arsip serta literatur-literatur yang berhubungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lahirnya politik luar negeri bebas aktif Indonesia karena terjadi pertentangan ideologi antara kedua blok besar sehingga Indonesia mencari jalan tengah untuk tidak memihak, kondisi dalam negeri juga sangat mempengaruhi karena terjadinya inflasi yang tidak terkontrol dan perlunya bantuan dari luar negeri, kemudian kondisi politik luar negeri pada pada masa Orde Lama menemui beberapa masalah karena melakukan konfrontasi dan keluarnya Indonesia dari PBB, sedangkan kondisi politik luar negeri pada masa Orde Baru merupakan antitesa dari politik luar negeri Orde lama. Pelaksanaan politik luar negeri awal Orde Baru arah kebijakan politiknya menjalin hubungan baik dengan barat dengan adanya IGGI dan Indonesia menjalin hubungan bertetangga yang baik dengan negara kawasan Asia Tenggara dengan adanya ASEAN dan menghentikan konfrontasi dan dalam politik luar negeri awal Orde Baru militer berperan aktif dalam politik luar negeri

Kata Kunci : Orde Baru, Politik dan Indonesia

Abstract

This study aims to determine the factors of the birth of Indonesia's free and active foreign policy, the conditions of foreign policy during the late Old Order and the Beginning of the New Order, and the implementation of the Indonesian foreign policy in the early New Order. This research uses historical research methods which consist of, heuristics (looking for and gathering sources), source criticism (internal and external criticism), interpretation (source interpretation) and historiography (historical writing). The method of data collection is done by conducting library research consisting of collecting sources of books, archives and related literature. The results showed that the factor of the birth of Indonesia's active free foreign policy was because of the ideological conflict between the two large blocks so that Indonesia was looking for a middle ground to be impartial, domestic conditions also greatly affected due to uncontrolled inflation and the need for foreign assistance, then conditions foreign policy in the Old Order encountered several problems due to confrontation and the departure of Indonesia from the United Nations, while the foreign political conditions during the New Order were antithetical to the Old Order foreign policy. The implementation of the New Order's early foreign policy in the direction of political policy established good relations with the west with the existence of IGGI and Indonesia having good neighbor relations with the Southeast Asian region with ASEAN and stopping confrontations and in the early New Order foreign policy the military played an active role in outside politics country.

Keywords: New Order, Politics and Indonesia

A. Pendahuluan

Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional dalam negara tersebut dalam lingkup internasional. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya.

Politik luar negeri adalah konteks keserasian dan saling menyesuaikan kondisi dalam negeri (internal) dan kondisi luar negeri (eksternal) yang harus berjalan seirama, serta harus ditunjang oleh kepala negara dalam konteks Indonesia yakni seorang presiden yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Seorang presiden harus mampu memahami keadaan internasional yang dinamis serta memahami apa yang menjadi kebutuhan dan sesuatu yang dianggap perlu demi terlaksananya tujuan dari politik luar negeri itu sendiri

Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, Indonesia menetapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif baik itu pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno maupun Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Politik luar negeri mulai dicanangkan sejak awal kemerdekaan (dkk, 2008). Politik luar negeri Indonesia didasari oleh beberapa faktor antara lain faktor dalam negeri, faktor luar negeri dan landasan-landasan dalam negeri

Bebas artinya Indonesia bebas menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara manapun baik hubungan dengan negara-negara barat maupun negara-negara dari timur tanpa harus terikat, aktif artinya bangsa Indonesia selalu berusaha berperan secara aktif dalam usaha menciptakan perdamaian yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Anon., 2018)

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia mengacu pada landasan konstitusional yakni tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu “ ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, Pasal 11 UUD 1945 “presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain” dan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dijadikan sebagai landasan idiil, adapula landasan operasional politik luar negeri yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional.

Masa Orde Baru bisa dikatakan masa awal melakukan pembangunan dalam berbagai aspek, pada masa pemerintahan Orde Baru arah kebijakan politik luar negeri Indonesia berubah dan lebih menekankan kondisi ekonomi dan stabilitas politik domestik, politik bebas aktif Indonesia diimplementasikan dengan mendekatnya Indonesia dengan negara barat, bukti nyata mendekatnya Indonesia dengan barat adalah dengan masuknya kembali Indonesia ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang bemarkas di Amerika Serikat, memerangi partai komunis Indonesia dimana komunis adalah ideologi yang dimiliki Rusia dan Cina dan pada masa pemerintahan Orde Baru membekukan hubungan bilateral dengan Cina (Suryadinata, 1998) .

Faktor anti imperialisme Orde Lama cenderung menjauhi barat karna menganggap sebagai simbol imperialisme baru terbukti pada masa pemerintahan orde lama menolak pemberian bantuan Amerika Serikat melalui program stabilisasi *International Monetary Fund* (IMF) dan melakukan nasionalisasi perusahaan Inggris dan Belanda di Indonesia (ransom, 2006) dan pada masa Orde Lama Indonesia berjuang untuk mendapatkan posisi politik yang signifikan di lingkungan internasional. Pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto memberikan dinamika tersendiri pada sistem politik dan proses pengambilan

keputusan karna perbedaan keyakinan, interpretasi dan gaya kepemimpinan sangat berpengaruh pada arah dan tujuan politik luar negeri suatu Negara

Masa Orde Baru banyak melakukan perbaikan hubungan dengan negara-negara tetangga seperti menghentikan konfrontasi terhadap Malaysia. Pada masa Orde Baru, Indonesia terlibat dalam kerja sama regional Asia Tenggara dengan membentuk *Association Of South East Asian Nations* (ASEAN) bersama dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina untuk memajukan kerja sama ekonomi dan budaya diantara negara-negara yang anti komunis. (Ricklefs, 2001)

B. Metode Penelitian

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematika, statistik dan komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Perlu kiranya memperhatikan unsur budaya dalam memilih metodologi yang akan dipilih dalam hal ini metode sangat penting adanya untuk mengoprasionalisasikan temuan-temuan di lapangan. (Najering, 2018; Najering and Ridha, 2018; Rifal, 2017, 2017; Rifal and Sumarti, 2018)

Secara sederhana penulisan ilmu sejarah dapat dijelaskan dengan beberapa tahap seperti pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber data), kritik (verifikasi keabsahan sumber sejarah), interpretasi (analisis dan sintesis), dan historiografi (penulisan). Berikut adalah penjelasan tahap-tahap penulisan sejarah

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Pengumpulan sumber atau dalam kajian sejarah akan lebih dikenal dengan heuristik. Heuristik merupakan proses pencarian atau pengumpulan sumber-sumber yang akan digunakan untuk, rekonstruksi sejarah.

Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber informasi lisan) dan cara memperolehnya. Sumber dibedakan atas sumber tulisan, lisan dan benda. Sumber sejarah primer yang tertulis dalam sejarah umumnya berupa dokumen (arsip). (Majid, 2011) Sumber-sumber dapat di klarifikasi dengan beberapa cara: mutakhir atau kontemporer (*contemporary*) dan lama (*remote*); formal (resmi) dan informal (tidak resmi); juga pembagian menurut asal (darimana asalnya), yang masing-masing dibagi-bagi lebih lanjut menurut waktu, tempat dan cara atau produknya. Pembagian-pembagian ini berhubungan dengan beberapa dari beberapa aspek dari sumber atau testimony dan pengetahuan ini amat membantu dalam mengevaluasi sumber-sumber.

Kegiatan mengumpulkan data ini dengan menggunakan metode kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji buku-buku, majalah, surat kabar serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penulisan. Kegiatan heuristik pada penulisan ini difokuskan pada kajian pustaka akan dikaji pada pembahasan berikut

1) Kepustakaan

Teknik mengumpulkan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku, majalah serta literatur lainnya yang diperoleh pada perpustakaan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan-bahan pustaka tersebut akan penulis peroleh dari sejumlah perpustakaan seperti : perpustakaan sejarah FIS-UNM, Perpustakaan Umum UNM, Perpustakaan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, perpustakaan multimedia

2) Kearsipan

Teknik mengumpulkan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca arsip arsip yang di peroleh pada perpustakaan dan arsip daerah.

2. Kritik

Hasil pengerjaan studi sejarah yang akademis dan kritis memerlukan fakta-fakta

yang teruji. Oleh karena itu, data-data yang diperoleh melalui tahapan heuristik terlebih dahulu harus dikritik atau disaring sehingga diperoleh fakta-fakta yang seobjektif mungkin. Kritik tersebut berupa kritik tentang otentitasnya (kritik ekstern) maupun kredibilitas isinya (kritik intern) dilakukan ketika dan sesudah pengumpulan data berlangsung.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah proses pemaknaan fakta sejarah. Dalam interpretasi, terdapat dua poin penting yaitu sintesis (menyatukan) dan analisis (menguraikan). Fakta-fakta sejarah dapat diuraikan dan disatukan sehingga mempunyai makna yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

4. Historiografi

Tahap Keempat ini adalah tahap terakhir metode sejarah setelah sumber dikumpulkan kemudian dikritik (seleksi) menjadi data dan kemudian dimaknai menjadi fakta, langkah terakhir adalah menyusun semuanya semuanya menjadi satu tulisan utuh berbentuk narasi kronologis.

C. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Pada dasarnya, penelitian tentang politik luar negeri sudah ada beberapa orang yang menelitinya, baik berupa karya dalam bentuk artikel maupun media massa dan media sosial.

Adapun sumber dan referensi yang ditemukan terkait tentang politik luar negeri yaitu skripsi yang ditulis oleh Sulfachriadi tahun 2016 dengan judul *Politik Luar Negeri Pada Masa Pemerintahan Soekarno 1949-1966*. Dalam pembahasan skripsi ini, pembahasan ini memfokuskan tentang politik luar negeri pada masa pemerintahan presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno, politik luar negeri indonesia yang bebas aktif telah memberikan dampak baik bagi Indonesia dan dunia pada umumnya, yakni diantaranya keadaan politik dalam negeri, hubungan dengan blok barat dan blok timur serta menjadi pelopor lahirnya gerakan non blok (Sulfachriadi, 2016). Adapun pembahasan yang akan dikaji oleh penulis

adalah politik luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Selanjutnya adapun buku-buku yang penulis anggap memiliki keterkaitan dengan penulisan yakni, Michael Leifer dengan buku berjudul "*Politik Luar negeri indonesia*" dalam buku ini membahas perkembangan politik luar negeri indonesia dari Pemerintahan Soekarno sampai Pemerintahan Soeharto, mulai dari masa Demokrasi liberal, Demokrasi Terpimpin sampai pada masa Orde Baru dan membahas faktor faktor yang mendominasi politik luar negeri indonesia (Leifer, 1986) sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada politik luar negeri periode awal Pemerintahan Soeharto. Kemudian Leo Suryadinata dengan buku yang berjudul "*Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*" dalam buku ini banyak membahas politik luar negeri indonesia pada masa orde baru mulai dari munculnya militer dan membahas hubungan indonesia dengan Negara Negara tetangga dan Negara Negara adikuasa pada masa pemerintahan Orde Baru tapi tidak membahas secara spesifik dampak politik luar negeri Orde Baru.

Selanjutnya Jurnal yang membahas *Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran* oleh Agus Haryono, dalam jurnal ini banyak membahas tentang prinsip-prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri Indonesia baik pada masa pemerintahan Soekarno sampai pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudiyono. (Haryanto, 2014)

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Akhir Orde Lama Dan Masa Awal Orde Baru

a. Kondisi Politik Luar Negeri Akhir Orde Lama

Era orde lama merupakan era yang identik dengan kepemimpinan soekarno menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama, politik luar negeri indonesia pada masa pemerintahan soeharto di arahkan untuk mempromosikan Indonesia ke dunia

internasional melalui slogan revolusi nasionalnya dan upaya mendapatkan pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia. masa orde lama diwarnai dengan sikap anti imperialisme dan kolonialisme serta bersifat militan.

Mengenai keadaan politik Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama tidak bisa dilepaskan terhadap dua model pemerintahan yang dijalankan pada waktu itu yakni Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi liberal sendiri merupakan sistem pemerintahan yang dimana kepala pemerintahannya di pimpin oleh perdana menteri sedangkan presiden hanya bertanggung jawab sebagai kepala negara. Sedangkan Demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan sekaligus kepala negara di pegang oleh seorang Presiden. Beralihnya sistem pemerintahan Indonesia dari sistem pemerintahan parlementer ke sistem pemerintahan Demokrasi terpimpin mengakibatkan semua kebijakan dipusatkan pada pemimpin negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno. Hal ini mengakibatkan presiden Soekarno lebih aktif dalam politik luar negeri Indonesia. Kemudian tidak bisa dilepaskan keadaan politik dalam negeri Indonesia dengan adanya Gerakan 30 September 1965

Kondisi politik luar negeri pada orde lama menemui beberapa masalah karena pemerintah orde lama melakukan konfrontasi dan keluarnya Indonesia dari PBB karena faktor anti imperialisme pemerintahan Orde Lama. Hal ini membuat Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama semakin dijauhi di dunia internasional

1. Konfrontasi dengan Malaysia
Yang menjadi awal mula permusuhan kedua negara ini yakni adanya perbedaan ideologi politik antara kedua negara tersebut dimana Indonesia cenderung anti-barat sedangkan Malaysia cenderung pro-barat. Selain dari pada itu, pada waktu itu pemerintah Indonesia juga mendapatkan tuduhan dari Tengku Abdul Rahman

sebagai bagian sendiri dari pemberontakan yang dilakukan oleh Azahari di Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962, yang pada waktu Azahari di Manila melakukan proklamasi dan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang perdana menteri Kalimantan Utara dengan wilayah Brunai, Sarawak dan Sabah. Terkait dengan adanya tuduhan tersebut Ketua Umum PNI, Ali Sastroamidjojo memberikan reaksi dengan membantah tuduhan tersebut. Hal ini membuat kemarahan dari Teuku Abdul Rahman yang kemudian mengeluarkan pernyataan kepada Presiden Soekarno yakni jangan campuri urusan Kalimantan Utara (SN, 2009)

Selain dari pada itu pembentukan negara Malaysia membuat Presiden Soekarno kembali merasa curiga, bahwa pembentukan negara tersebut merupakan usaha yang dilakukan kekuatan neokolonialisme untuk mengepung Indonesia. Dimana kecurigaan tersebut didasari pada pandangan Presiden Soekarno terhadap Indonesia sebagai Nefo akan dikepung oleh kekuatan Oldefo. Hal ini didasari pada posisi Indonesia sendiri yang di mana sebelah utaranya berbatasan dengan Malaysia.

Pada perkembangannya, hubungan kedua negara ini semakin memburuk dimana pada waktu itu pada tanggal 30 Januari 1963, Kamaruddin H Idris selaku Duta besar Malaysia untuk Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan di panggil kembali oleh pemerintah Malaysia. (Sunarti, 2014) Dimana hal tersebut kemudian juga disusul dengan Deklarasi Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Sehari setelah pendeklarasian tersebut Indonesia juga mengambil tindakan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara Malaya. (Notosusanto., 1992) Pemutusan hubungan diplomatik merupakan bentuk dari ketidaksenangan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembentukan Federasi Malaya.

Selain dari pada itu bentuk ketidaksenangan terkait pembentukan Federasi Malaysia juga di respon oleh masyarakat

Indonesia, dimana pada waktu itu terjadi demonstrasi berujung pada pembakaran gedung kedutaan Inggris dan Malaya di Indonesia. Terkait dengan adanya reaksi dari masyarakat Indonesia tersebut, maka Masyarakat Malaysia pun melakukan aksi demonstrasi dan pengrusakan terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di sana, dengan merobek-robek foto Presiden Soekarno dan membawa lambang garuda, kemudian memaksa Tengku Abdul Rahman untuk menginjak-injaknya. Hal yang dilakukan oleh Tengku Abdul Rahman pada waktu itu membuat Presiden Indonesia marah dan mengeluarkan gerakan yang dikenal dengan nama "Ganyang Malaysia".

Konfrontasi fisik oleh kedua negara tidak bisa dihindarkan lagi. Pemerintah Indonesia pada waktu itu dalam sebuah rapat pada tanggal 3 Mei 1964 mengumumkan sebuah perintah yang dikenal dengan nama Dwi Komando Rakya (Dwikora).

Terkait dengan meningkatnya ketegangan kedua negara tersebut membuat PBB turun tangan untuk meredakan ketegangan kedua negara tersebut. Adapun hal yang dilakukan PBB pada waktu itu yakni mendesak kepada kedua negara untuk menyelesaikan konfliknya dalam meja perundingan. Perundingan pertama dilakukan di Bangkok Thailand tapi tidak menemui kata damai karena usul yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ditolak, selanjutnya perundingan kedua diadakan di Tokyo Jepang namun masih saja mengalami kegagalan.

Pada perkembangan magannya kondisi dalam negeri Indonesia mengalami kekacauan dan memberi dampak terhadap penyelesaian konflik antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan pasca terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI beserta pengikutnya membuat keamanan nasional menjadi terganggu karena pada waktu itu terjadi demonstrasi-demonstrasi yang menuntut tiga tuntutan kepada pemimpin Indonesia yang dikenal dengan TRITURA.

Terkait dengan tidak stabilnya keamanan nasional pada waktu itu, kemudian Soeharto yang telah berpangkat panglima AD pada waktu itu mendesak Presiden Soekarno agar segera mengeluarkan surat perintah untuk menjaga keamanan jalannya pemerintahan. Akhirnya presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah tertanggal 11 maret 1966 kepada Soeharto. Sehubungan dengan dikeluarkannya surat tersebut berdampak pada makin melemahnya pengaruh kepemimpinan Soekarno di dalam negeri. Dimana hal sebaliknya terjadi pada Soeharto, berkat adanya surat perintah tersebut telah menguatkan posisinya didalam negeri.

Sehubungan dengan melemahnya pengaruh kepemimpinan Presiden Soekarno di dalam negeri dimanfaatkan oleh tun Abdul Razak selaku menteri luar negeri Malaysia untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan Malaysia yang telah rusak. Maka pada tanggal 27 Mei 1966 Soeharto dan pemimpin Malaysia yakni Tengku Abdul Rahman mengadakan pertemuan di Jakarta. Dimana pertemuan tersebut di lanjutkan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1966 di Bangkok pada saat itu Indonesia di wakili oleh Mentri Luar Negeri Adam Malik sedangkan Malaysia di wakili oleh Menteri Luar Negeri Tun Abdul razak yang telah menghasilkan persetujuan yang di kenal dengan "Persetujuan Bangkok". (Sudarmono, 1989) Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah:

- a. Kepada rakyat sebah dan serawak diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam masyarakat Malaysia
- b. Kedua pemerintah menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
- c. Menghentikan tindakan-tindakan permusuhan.

Maka dari pada itu pada tanggal 11 Agustus 1966 hasil pertemuan tersebut di tandatangani. Maka dengan ini konflik antara Indonesia dan Malaysia telah berakhir.

2. Indonesia keluar dari PBB

Politik luar negeri Indonesia yang militan mendapat perhatian khusus dari Ameerikas Serikat dan menginginkan Soekarno meninggalkan politik luar negerinya yang agresif sebagai imbalan amerika akan memberikan bantuan namun presiden Soekarno menolak tekanan amerika dan menciptakan ketegangan berkepanjangan antara Amerika Serikat dan indonesia, indonesia lebih berorientasi pada blok timur dan puncaknya di dalam rapat umum anti pangkalan militer yang di selenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 januari 1965 Presiden Soekarno mengomandokan indonesia keluar Dari PBB.

Keluanrya Indonesia dari PBB tidak terlepas dari diterimanya Malaysia di Dewan keamanan sebagai anggota tidak tetap karna indonesia menganggap Malaysia adalah negara boneka dari Inggris dan Amerika Serikat hal ini menimbulkan anggapan bahwa PBB telah dimanipulasi oleh Amerika Serikat (Fernandes, 1988) karna sebelumnya indonesia mengajukan protes tapi tidak mendapat simpati dari dunia internasional. Keputusan keluar dari keanggotaan PBB dianggap terlalu berani oleh negara negara lain hanya beberapa negara-negara komunis khususnya Republik Rakyat China yang menyatakan dukungan atas keluarnya Indonesia dari PBB.

Peristiwa keluarnya Indonesia dari PBB dan pelaksanaan politik luar negeri indonesia yang konfrontatif menyebabkan terisolasinya Indonesia di dunia internasional, padahal prinsip politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif yang menekankan adanya persahabatan dan kerjasama dengan berbagai bangsa atas dasar saling menghormati kedaulatan masing-masing. Khususnya negara-negara Non Blok maupun kelompok Asia Afrika semakin menjauhkan diri dari karena tidak setuju dengan politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk keluar dari PBB semakin

menempatkan posisi Indonesia dalam keadaan yang sulit hanya beberapa negara Blok komunis yang belum menjadi anggota PBB seperti Vietnam Utara dan RRC yang mendukung tindakan Indonesia. Di lain pihak hubungan indonesia dengan negara-negara Blok Barat semakin memburuk. Keadaan yang demikian sangat mematangkan Indonesia baik di dalam negeri maupun di dalam pergaulan internasional untuk menjadi suatu negara komunis. (Sabir, 1987)

Anak Agung dalam salah satu suratnya kepada Hatta memberikan komentar mengenai keluarnya Indonesia dari PBB beserta akibatnya sebagai berikut : "Memang Presiden Soekarno boleh berkata, bahwa keputusan tersebut menggegerkan seluruh dunia, akan tetapi, sepanjang pendengaran saya di dalam hampir semua siaran radio luar negeri, tindakan tersebut tidaklah mendapat simpati dan penghargaan kecuali dari RRC, Korea Utara dan Vietnam Utara ketiga negara yang tidak menjadi anggota PBB. Bukan saja negara neokolin yang mencela tindakan Presiden Soekarno itu, akan tetapi hampir semua negara-negara Asia Afrika seperti Mesir, India dan lain- lain negara kelompok tersebut bukan saja menyayangkan tindakan itu, bahkan mencelanya dan menganggap politik berjibaku ini di dalam bidang internasional suatu pertanda bahwa Indonesia sudah merupakan satelit dari Pecking. Tidaklah pernah Indonesia pada dewasa ini demikian terencil kedudukannya dan kehilangan kawan-kawan yang setia di dalam pergaulan antar bangsa". (Agung, 1987)

Dengan demikian keputusan untuk keluar dari dari PBB tidak mendapat dukungan dari kelompok yang di anggap negara baru atau Nefos sekalipun, posisi Indonesia yang terisolir terlihat pula pada forum-forum internasinal lainnya yang berlangsung pada tahun 1965. Dalam beberapa forum yang berlangsung, negara-negara lain enggan untuk bekerja sama dengan Indonesia misalnya dalam forum konfrensi Islam Asia Afrika pada bulan

Maret 1965 di Bandung, suatu rancangan resolusi yang di sponsori oleh Indonesia dan Republik Rakyat Cina untuk menolak keberadaan Malaysia tidak mendapat dukungan. Walaupun dalam ajakan itu Presiden Soekarno mengatakan bahwa kita sekarang sedang menyerang kubu terakhir Imprealisme. Pada akhirnya salah satu dari hasil konfrensi tersebut menemui penentangan terhadap usaha-usaha pembuatan senjata nuklir.

Kemudian pada peristiwa peringatan satu dasawarsa Konfrensi Asia Afrika yang di selenggarakan pada bulan april 1965 di Jakarta terlihat pula ketidak sediaan negara-negara lain untuk bekerja sama dengan Indonesia. Dari 60 negara yang di undang hanya 36 negara yang bersedia hadir. Menurut Leifer para delegasi yang hadir dalam peringatan satu dasawarsa Konfrensi Asia Afrika telah menolak anggapan bahwa Malaysia merupakan manifestasi dari neokolonialisme. Indonesia yang mampu mengisolasi Malaysia secara internal tetapi justru indonesia sendirilah yang terisolasi di dunia internasional

Dengan demikian pelaksanaan politik yang konfrontatif maka politik luar negeri indonesia tidak di tujukan untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya sebaliknya semakin memperbanyak permusuhan dan menyebabkan hubungan yang tidak harmonis dengan negara negara lain dan mengisolasi diri dari dunia internasional terutama terisolasi di bidang politik

Dengan keluarnya Indonesia dari PBB sasaran-sasaran yang ingin di capai oleh pemerintah Orde Lama tidak tercapa karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum organisasi organisasi Internasional

b. Kondisi Politik Luar Negeri Indonesia Masa Awal Orde Baru

Pergantian kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru memberikan dinamika tersendiri pada sistem politik dan proses pengambilan keputusan karna perbedaan keyakinan. Pergantian rezim senantiasa di ikuti oleh perubahan kebijakan. Era Orde

Baru merupakan era yang identik dengan dengan kepemimpinan Soeharto.

Salah satu kondisi yang memberi kemudahan Soeharto mengembang kekuatan politiknya muncul ketika ia berhasil mempengaruhi Presiden Soekarno supaya memberi wewenang kepada untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa gerkan 30 September. Presiden Soekarno akhirnya mengangkatnya menjadi panglima dari suatu unit yang di bentuk khusus untuk untuk permasalahan gerakan 30 September, yaitu Komandan Operasi Keamanan dan Ketertiban pada tanggal 2 Oktober 1965. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 maret tahun 1966

Tahun 1966 merupakan masa transisi Orde Baru dari Orde Lama dan di tandai dengan dengan terjadinya pergeseran pusat perhatian utama pemerintah yang terfokus dari masalah pembangunan bangsa ke masalah pembangunan ekonomi yang sangat serius.

Masa Orde Baru terjadi perubahan pola hubungan diplomatik Indonesia,karna dimana pada masa Orde Lama terjadi hubungan diplomatik yang kurang baik dengan beberapa negara karena karakter pemimpin bangsa yang begitu kuat dalam pandangan internasional.

Perubahan yang terjadi pada masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari pemikiran awal yang disampaikan oleh Soeharto dalam pidatonya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada 1966,yang intinya ada dua hal utama yaitu stabilitas politik keamanan dan pembangunan ekonomi. (Wuryandari, 2008)

Persoalan yang di hadapi pada masa awal Orde Baru adalah bagaimana mengatasi warisan era Orde Lama di mana pada masa Orde Lama melakukan konfrontasi dengan Malaysia , hubungan kurang baik degan negara negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan keluar dari PBB, belum lagi masalah ekonomi yang di wariskan oleh Orde lama terutama Inflasi yang tinggi melebihi 500 persen pada tahun

1965 dengan harga beras yang meningkat sebanyak 900 persen belum lagi warisan hutang yang mencapai jumlah kira-kira 2,400 juta dolar Amerika Serikat.

Pada masa Orde Baru melakukan usaha normalisasi hubungan dengan Malaysia dengan melakukan perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1966, setelah kedua belah pihak menyetujui hasil perundingan Bangkok kemudian diresmikan normalisasi antara kedua negara yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menjaga prinsip hidup bertetangga yang baik dan prinsip non agresi sesuai dengan prinsip bebas aktif selain dari pada itu hal ekonomi juga menjadi pertimbangan karena apabila politik konfrontasi berlarut-larut akan menelan biaya yang besar padahal kondisi perekonomian Indonesia sedang melemah.

Selanjutnya pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Masuknya Indonesia sebagai anggota PBB berlangsung lancar tanpa melalui prosedur yang sulit, karena di dalam piagam PBB tidak dicantumkan suatu peraturan tidak mem-perkenankan atau melarang pengunduran diri suatu negara dari organisasi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjalin hubungan internasional sehingga terwujudnya normalisasi antar bangsa, sekaligus diharapkan mendapatkan suatu keuntungan bagi tercapainya pembangunan di Indonesia untuk pemulihan perekonomian dan hubungan internasional.

Setelah normalisasi hubungan dengan Malaysia menjadi pendorong pulihnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok Barat terutama dengan Inggris dan Amerika Serikat, dengan negara-negara kelompok Asia-Afrika dan Non Blok dijalin kembali persahabatan yang lebih erat. Hal ini membuat mengalir bantuan maupun kerja sama di bidang ekonomi dari beberapa negara blok Barat seperti Amerika Serikat. Adam Malik menerangkan, bahwa hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada pemerintahan Orde Baru memang sangat baik dan negara ini

merupakan salah satu penyumbang penting dalam bidang ekonomi Indonesia. (Malik., 2987)

Alasan pembekuan hubungan dengan Republik Rakyat China karena Pemerintah Orde Baru menganggap bahwa Republik Rakyat Cina terlibat dalam Gerakan 30 September. Pemerintah Indonesia juga menganggap bahwa Republik Rakyat Cina sebagai ancaman keamanan nasional. Pembekuan hubungan diplomatik juga merupakan kepentingan nasional untuk menarik perhatian negara-negara barat dengan membangun citra sebagai negara yang anti komunis, sehingga Indonesia berharap mendapat bantuan dan pinjaman luar negeri dari negara-negara barat dan untuk menghindari potensi Indonesia jatuh ke tangan komunis.

Sebelum terjadi pembekuan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China. Republik Rakyat China menolak tuduhan keterlibatan atas gerakan 30 September bahkan mengambil sikap yang sangat keras atas tuduhan pemerintah Orde Baru, mulai dari menyebut Orde Baru sebagai antek barat sampai menghentikan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Sikap keras dari China memunculkan protes dan sentimen negatif dari sebagian masyarakat Indonesia sehingga menyebabkan penyerangan terhadap kantor-kantor Konsulat China dan penyerbuan dan pengrusakan terhadap gedung Kedutaan Besar China di Jakarta pada 24 Maret 1966. (Fauzi, 2014)

Semakin membengkaknya hutang negara terhadap Dewan Penyalut, menyebabkan semakin tergantungnya Indonesia pada negara penyalut. Ketergantungan ini memberikan efek yang sangat riskan terhadap perekonomian Orde Baru, kondisi yang demikian mau tidak mau negara harus mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk menutupi utang-utang Indonesia. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Undang Undang yang disahkan pada tanggal 1 Januari 1967 tersebut membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk orang asing untuk membangun perusahaan di Indonesia. Dengan lahirnya Undang Undang Penanaman Modal Asing, Indonesia berada dalam kondisi terbuka untuk pemodal asing untuk investasi di Indonesia, hal hal penting yang menyangkut Penanaman Modal Asing ialah sebagai berikut:

- a. Jaminan bahwa tidak ada kehendak untuk menasionalisasi milik asing dan jaringan adanya konpesnsasi pembayaran jika terjadi nasionalisasi (pasal 21 dan pasal 22)
- b. Masa kerja setiap kegiatan perusahaan asing ialah 30 tahun yang kemudian dapat di perpanjang sesuai dengan persetujuan
- c. Pembebasan pembayaran deviden dan pajak perusahaan bagi investor asing sampai selama 3 tahun, kerugian dapat di perhitungkan sebagai tambahan terhadap pembebasan pajak yang telah lewat (pasal 15).
- d. Pembebasan bea masuk terhadap mesin mesin yang di infor besrta perlengkapannya,demikian halnya dengan bahan baku selama 2 tahun(pasal 15).
- e. Kebebasan penuh untuk merekrut tenagamanajemen dan teknisi asing bagi jabatan dan pekerjaan semacam itu yang belum sanggup dilakukan oleh tenaga Indonesia (pasal 11)
- f. Kebebasan melakukan pemindahan keuntungan, dana defresiasi dan hasil penjualan saham kepada warga negara indonesia (pasal 19 dan pasal 24). (Robison, 2012)

Terlepas dari hal itu Penanaman Modal Asing secara tidak langsung akan menimbulkan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kata lain bahwa ketika perusahaan-perusahaan asing yang berkiprah di Indonesia berkembang, maka secara tidak langsung akan memberikan efek kepada perusahaan

perusahaan domestik untuk berkembang pula.

Kebijakan luar negeri Indonesia pasca 1966 lebih jauh di arahkan untuk membina kerja sama antar bangsa, terutama kerja regional di lingkup Asia Tenggara. Presiden Soeharto menyatakan di depan DPR pada tanggal 16 Agustus sebagai berikut: “Apabila masalah Malaysia ini telah diselesaikan, kita dapat mengarah ke arah kegiatan-kegiatan dalam bidang kebijaksanaan luar negeri yang menjalin kerjasama yang erat berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara negara-negara Asia Tenggara. Kemudian akan menghidupkan kembali gagasan mafilindo dalam lingkup yang lebih luas untuk mencapai suatu Asia Tenggara yang bekerjasama dalam berbagai bidang, terutama bidang-bidang ekonomi, tehnik dan budaya”.

Keinginan tersebut terwujud ketika pada tanggal 8 Agustus 1967 berhasil di tandatangani deklarasi Pembentukan *Association Of South East Asian Nations* (ASEAN) . Kerjasama dengan berbagai bangsa mulai dipupuk seluas mungkin dengan prinsip saling menghormati dan hidup bertetangga yang baik dengan tidak menghentikan untuk terus berperan penting dalam usaha untuk mewujudkan tatanan dunia yang sejahtera penuh perdamaian.

Terciptanya suatu lingkungan regional yang kondusif merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia, hal ini penting karena indonesia membutuhkan adanya lingkungan yang relatif stabil yang dapat membuat indonesia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi domestik. Kondisi yang berusaha di capai indonesia dengan dua cara:

- a. Memperbaiki citra Indonesia di lingkungan Asia Tenggara yang cenderung di pandang sebagai negara yang berhaluan kiri yang radikal. Perbaiksn citra tersebut antara lain dilakukan dengan menanggalkan kebijakan anti imprealisme barat, dan menunjukan orientasi ideologi baru

yang non dan anti komunis. Usaha-usaha untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan pembekuan hubungan diplomatik dengan RRC merupakan indikasi perbaikan citra tersebut.

- b. Yang dilakukan Indonesia untuk menciptakan lingkungan regional yang kondusif adalah dengan melibatkan diri dalam pembentukan wadah kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama regional tersebut terwujud dalam institusi ASEAN. Dalam ASEAN Indonesia lebih mengutamakan adanya kerangka interaksi yang di akui bersama. (Prodjodikoro, 1985)

Setelah melakukan beberapa upaya seperti menghentikan konfrontasi, masuk kembali ke PBB dan beberapa kebijakan lainnya hal ini membuat citra Indonesia di bawa kepemimpinan Orde Baru mulai membaik di dunia internasional.

E. Kesimpulan

Kondisi politik luar negeri Indonesia pada masa akhir Orde Lama menemui beberapa masalah karna pemerintah orde lama melakukan konfrontasi dan keluarnya Indonesia dari PBB karna faktor anti imperialisme pemerintahan Orde Lama yang menentang penindasan bangsa atas bangsa lain. Hal ini membuat Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama semakin dijauhi di dunia internasional dan Kondisi Politik pada Masa awal Orde Baru melakukan usaha normalisasi hubungan dengan Malaysia, masuk kembali menjadi anggota PBB, membekukan hubungan diplomatik dengan negara-negara Komunis, membuat kebijakan penanaman Modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan ikut membentuk kerjasama regional.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa periode awal pemerintahan Orde Baru lebih diarahkan negara-negara barat seperti Amerika Serikat terbukti dengan adanya IGGI yang menjadi pendonor bantuan luar negeri untuk Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk menjalin hubungan bertetangga yang baik di

kawasan Asia Tenggara bersama dengan Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia membentuk kerjasama regional dengan nama ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 agustus 1967, selanjutnya pada masa Orde Baru militer berperan aktif dalam politik luar negeri Indonesia karna adanya Dwifungsi ABRI sehingga militer dapat terlibat dalam penyusunan dan perumusan agenda politik luar negeri Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. H. & A. A. G., 1987. *Surat Menyurat Hatta Dan Anak Agung Gde: Menjujung Tinggi Keagungan Demokrasi Dan Mengutuk kezaliman diktator*. Jakarta:
- Fauzi, N. A., 2014. Politik Luar negeri Indonesia dan Malaysia Terhadap China di Era Perang Dingin.. *Jurnal INSIGNIA*., Volume 1, p. 20.
- Fernandes, F. S., 1988. *Hubungan Internasional Dan Peranan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Dekdikbud, Dirjen Dikti..
- Haryanto, A., 2014. Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*., Volume IV.
- Leifer, M., 1986. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Majid, A. H. d. M. s., 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. UjungPandang: Ombak.
- Malik., A., 2017. Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru . In: Jakarta: Yayasan Idayu, p. 26.
- Najering, R., 2018. Optimisme Ekonomi Nelayan di Tengah Pergolakan Politik Sulawesi Selatan 1954-1965. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science* 2, 38-50.
- Najering, R., Ridha, M.R., 2018. Orang Bugis dalam Silang Budaya Bahari di Pelabuhan Sunda Kelapa. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science* 2, 25-37.

- Rifal, 2017. *Modernisasi dan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kampung Gusung Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1954-1998*. Universitas Indonesia, Depok.
- Rifal, P., Sunarti, L., 2018. The impact of modernization on the economy for fishermen in Makassar City. *Cultural Dynamics in a Globalized World*.
- Notosusanto., M. D. P. d. N., 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, W., 1985. In: *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, cet II*. Jakarta: PT Eresco, p. 75.
- ransom, D., 2006. *Mafia Barkelay Dan Pembunuhan Massal Indonesia Jakarta selatan*. Jakarta selatan : Kualisi anti utang.
- Ricklefs, M. C., 2001. *Sejarah Indoensia Modern 1200-2004..* Jakarta: Palgrave.
- Robison, R., 2012. . In: *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* . Depok: Komunitas Bambu, p. 108.
- Sabir, H., 1987. *Politik Bebas Aktif Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta: CV haji Masagung.
- SN, .. F. d. A., 2009. *Ganyang Malaysia .Yogyakarta : Bio Pustaka. Hlm 38*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Sudarmono, 1989. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: PT.Citra Lamtoro Gung Persada..
- Sulfachriadi, 2016. “Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1949 -1966)” . In: *Skripsi*. Makassar: FIS UNM.
- Sunarti, L., 2014. *Persaudaraan Sepanjang Hayat*. Serpong Utara: Serat Alam Media.
- Suryadinata, L., 1998. *Politik luar negeri Indonesia di bawah soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Wuryandari, G., 2008. Politik luar negeri Indonesia di tengah pusaran domestik. . In: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. 115.